

## TOLERANSI, KETENAGAKERJAAN DAN HAM DI ASEAN

### Abstrak

Masalah ketenagakerjaan terutama pekerja migran, HAM dan intoleransi keagamaan mendapat perhatian luas dan memerlukan penanganan segera sebelum terjadi efek domino yang nantinya justru menjadi konflik baru di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, sudah selanyaknya berperan aktif sampai level pemerintahan desa. Kehadiran ASEAN yang lebih pro aktif dengan mengedepankan pendekatan sosial budaya dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan, HAM dan intoleransi keagamaan akan menjadi jalan dalam membumikan ASEAN di tengah-tengah masyarakat Asia Tenggara.

Sejalan dengan hal tersebut, ASEAN akan lebih mampu mengidentifikasi sumber-sumber dan model-model pemajuan kegiatan HAM di Asia Tenggara dengan pelibatan lebih banyak lagi tokoh masyarakat dan agama. Terlebih, ASEAN menjadi bagian terpenting sebagai institusi perubahan di Asia Tenggara dalam membangun komunikasi dan menyebarkan informasi bagi masyarakat dari negara-negara anggota ASEAN, dengan demikian ASEAN tidak lagi bersifat elitis melainkan ASEAN menjadi organisasi yang selalu diharapkan oleh masyarakat.

### A. Pendahuluan.

Kerjasama ASEAN di sektor kebudayaan berkembang sejak dibentuknya subsidiary body dengan nama ASEAN Committee on Culture and Information (ASEAN-COCI) pada tahun 1978, yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dan penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian (mutual understanding) dan kesetiakawanan di antara masyarakat ASEAN<sup>1</sup>.

Kehadiran ASEAN sejak dari awal berdirinya hingga saat ini telah ikut membangun kehidupan sosial budaya di antara negara-negara ASEAN, buktinya terbentuk ASEAN Socio-Cultural Community atau Masyarakat Sosial Budaya ASEAN merupakan salah satu bagian dari tiga pilar penting yang saling terkait satu sama lain dalam rangka pencapaian visi dan misi negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk Masyarakat ASEAN di tahun 2015. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN ini menitikberatkan fokusnya terhadap pengembangan sosial dan budaya masyarakat sebagai upaya dari negara-negara anggota ASEAN dalam mengatasi berbagai macam permasalahan sosial budaya negara mereka terutama dalam aspek kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat<sup>2</sup>.

Berbagai kegiatan kerja sama sektor kebudayaan dilakukan melalui penyelenggaraan workshop dan symposium di bidang seni dan budaya,

---

<sup>1</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2015. *Masyarakat Sosial Budaya ASEAN* [online]. Sumber :<http://www.kemlu.go.id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Sosial-Budaya-ASEAN.aspx>, diakses pada tanggal 20 Juli 2017.

<sup>2</sup>*Ibid.*

ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, serta pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Adapun di sektor informasi, berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain, pertukaran berita di antara Negara anggota ASEAN yang ditayangkan pada televisi nasional di masing-masing Negara anggota ASEAN (ASEAN TV News) serta penayangan berita dan informasi mengenai ASEAN melalui radio-radio nasional<sup>3</sup>.

Di tengah penguatan sosial budaya ASEAN, munculah tantangan dan masalah yang sangat berat dan medesak yaitu masalah HAM. HAM menjadi penting untuk diperhatikan karena tinggi – rendahnya tingkat pelanggaran HAM sering berkaitan erat dengan kualitas demokrasi sebuah negara. Sudah tentu demokrasi adalah persoalan yang jauh lebih rumit dari sebatas pelanggaran HAM. Akan tetapi, tidak selamanya bahwa pelaksanaan HAM di sebuah negara bersifat linier dengan kualitas demokrasi, namun hal ini mampu mendorong proses demokratisasi pada bentuk yang lebih sempurna, karena pada situasi ini masyarakat memiliki kesadaran lebih tentang pemenuhan hak-haknya, sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan negara melalui penyaluran aspirasinya<sup>4</sup>.

ASEAN juga belum menyentuh persoalan yang ditimbulkan dari buruh migran, sementara realita yang terjadi bahwa negara-negara Asia Tenggara berkontribusi terhadap 18,8 juta jumlah tenaga kerja migran pada tahun 2013, dengan 6,5 juta di antaranya bergerak di dalam wilayah ASEAN. Meski jumlah ini semakin meningkat, isu buruh migran tetap menjadi isu klasik yang sampai saat ini belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah nasional maupun ASEAN sebagai organisasi kawasan<sup>5</sup>.

Konflik keagamaan yang muncul menarik perhatian luas yang melintasi batas negara, kasus terbaru terkait ancaman dari tokoh Buddha radikal asal Myanmar Ashin Wirathu terhadap Aceh akibat diterapkan hukuman cambuk yang diberlakukan terhadap penganut Buddha di Aceh mengusik kehidupan keagamaan di Aceh dan telah memicu kemarahan umat Buddha di Myanmar<sup>6</sup>.

Permasalahan ketenagakerjaan terutama tenaga kerja migran, masalah HAM yang menjadi perhatian baru ASEAN dengan terbentuknya AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*) dan munculnya sikap-sikap intoleransi keagamaan yang berdampak pada munculnya masalah-masalah sosial budaya di ASEAN, menuntut segera berperannya ASEAN secara nyata yang bukan hanya sebagai wacana-wacana sosial politik saja melainkan sudah sepatutnya hadir dan ikut serta menanggulangi permasalahan sosial budaya yang ada dengan menggerakkan seluruh elemen bangsa dari negara-negara anggota ASEAN.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada, Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara (Tahun 2010), sumber :<http://pssat.ugm.ac.id/2016/01/14/pelanggaran-hak-asasi-manusia-ham-di-asia-tenggara-tahun-2010/>, diakses tanggal 20 Juli 2017.

<sup>5</sup> Universitas Gadjah Mada, Persoalan Buruh Migran Belum Menjadi Perhatian di ASEAN, sumber :<https://ugm.ac.id/id/news/13422-persoalan.buruh.migran.belum.menjadi.perhatian.di.asean>, diakses tanggal 20 Juli 2017.

<sup>6</sup>Nahimunkar.com, Budha Myanmar Ancam Akan Menyerang Aceh, Rakyat Aceh Siap Perang, sumber :<https://www.nahimunkar.com/budha-myanmar-ancam-akan-menyerang-aceh-rakyat-aceh-siap-perang/>, diakses tanggal 20 Juli 2017.

## B. Analisa.

Tingginya angka kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran, mendorong berbagai pihak terutama negara ASEAN akan pentingnya mekanisme dan kebijakan ASEAN yang komprehensif guna melindungi hak buruh migran dan keluarganya. Dorongan tersebut kemudian berhasil menghasilkan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Buruh Migran yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada 13 Januari 2007. Poin 22 Deklarasi yang ditandatangani di Cebu, Filipina tersebut menugaskan badan-badan ASEAN yang terkait untuk menindaklanjuti Deklarasi dan mengembangkan instrumen ASEAN tentang perlindungan dan promosi hak-hak buruh migran. Sayangnya, setelah tujuh tahun instrumen yang seharusnya menjadi standar regional bagi perlindungan buruh migran masih belum selesai dibahas. Panjangnya pembahasan instrumen ini, serta berbagai perdebatan yang terjadi menunjukkan perlindungan buruh migran belum menjadi prioritas bagi negara-negara ASEAN<sup>7</sup>.

Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dimulai pada 26-30 April 2017. Salah satu pekerjaan rumah yang ingin diselesaikan dalam pertemuan ini adalah kesepakatan mengenai proteksi dan promosi hak pekerja migran di Asia Tenggara. Pembahasan tersebut sudah dimulai sejak 2007. Namun, sampai sekarang persetujuan tersebut mengalami jalan buntu<sup>8</sup>.

Pemberlakuan MEA juga mendorong tingginya perpindahan tenaga kerja migran di negara-negara anggota ASEAN, namun tingginya mobilitas tersebut tidak ditunjang oleh perlindungan dan promosi hak pekerja. Hal ini tentunya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial baru seperti kesenjangan kesempatan kerja dan kesenjangan tingkat penghasilan yang diperoleh pekerja, akhirnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik sosial yang memundurkan kemajuan yang selama ini sudah dicapai oleh ASEAN *Committee on Culture and Information*.

Apabila konflik sosial yang menyakut ketenagakerjaan ini terus belangsung tanpa ada penyelesaian, bukan tidak mungkin terjadi konflik rasial yang melibatkan dua masyarakat atau lebih negara anggota ASEAN. Kekhawatiran ini sepatutnya mendapatkan respons cepat dari ASEAN yang tidak hanya mampu membuat regulasi-regulasi tanpa aksi melainkan harus menjadi organisasi regional yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ASEAN secara menyeluruh.

Ancaman ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut sosial, budaya, politik dan hankam, melainkan juga sudah menjadi isu HAM karena sering sekali dalam beberapa kasus pekerja migran didapati unsur pelanggaran HAM, namun demikian banyak pengamat menilai pelaksanaan HAM di Asia

---

<sup>7</sup>Soliaritas Perempuan Women's Solidarity for Human Rights, Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya di Negara ASEAN, sumber : <http://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2013/04/Situasi-Kekerasan-dan-Pelanggaran-Hak-Buruh-Migran-Perempuan-dan-Keluarganya.pdf>, diakses tanggal 20 Juli 2017.

<sup>8</sup>Andreas Gerry Tuwo, Kesepakatan Proteksi Pekerja Migran ASEAN Mandek, Ini Sebabnya, sumber : <http://global.liputan6.com/read/2931868/kesepakatan-proteksi-pekerja-migran-asean-mandek-ini-sebabnya>, diakses tanggal 20 Juli 2017.

Tenggara lamban, rentan disalahgunakan, lemah, tercemar korupsi, dan sebagainya<sup>9</sup>.

Memang ada harapan baru penegakan HAM di ASEAN dengan dibentuknya AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*), komisi ini bergerak atas dasar mandat dan sejumlah aturan main yang disetujui di level kepala negara. Namun sangat disayangkan Komisi HAM ASEAN ini tidak diberi kewenangan untuk menerima pengaduan, padahal dalam *Terms of Reference* (ToR)-nya tujuan Komisi HAM ASEAN tidak hanya mempromosikan tetapi juga bergerak dalam bidang perlindungan<sup>10</sup>.

Belum membuminya AICHR di level masyarakat paling bawah terutama sekali dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan Komisi HAM ASEAN ini dan belum tercapainya konsensus bersama yang disepakati oleh anggota ASEAN mengenai strategi pemajuan HAM, sejumlah pihak menuding proses konsensus sebagai penghambat pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN<sup>11</sup>.

Perbedaan yang sangat jauh antara sosial budaya masyarakat Barat dan Timur dalam pendekatan dan pemahaman HAM menjadi menarik, karena pendekatan untuk mengangkat HAM sebagai prinsip yang universal di Asia Tenggara tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seperti yang dilakukan masyarakat Barat yang cenderung rasional dan sekuler, tetapi harus dengan pendekatan Asia yang lebih mengutamakan *rasa*<sup>12</sup>, dengan kata lain pendekatan HAM di Asia sebaiknya dilakukan melalui pendekatan sosial budaya agar bisa diterima oleh masyarakat dari negara anggota ASEAN.

Tak kalah pentingnya dari HAM adalah masalah keagamaan yang saat ini menjadi sorotan utama berbagai pengamat dan media. Masalah etnis Rohingya di Myanmar telah melahirkan solidaritas umat Islam di Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya dan masalah terorisme yang berismeden keagamaan telah memasuki wilayah ASEAN, termasuk masalah Filifina Selatan yang membuat negara-negara yang berbatasan langsung dengan Filifina Selatan memperketat pengawasan teritorialnya. Semua itu tidak hanya bisa diselesaikan melalui cara-cara kekerasan melainkan harus diupayakan dengan cara-cara pendekatan sosial budaya.

Masalah-masalah yang mencul dan terjadi di ASEAN memerlukan keterlibatan dua atau lebih sub organisasi/komisi yang ada dalam ASEAN. Ketika menghadapi masalah HAM misalnya, bukan saja AICHR yang hadir dan menanganinya melainkan juga memerlukan keterlibatan sub organisasi/komisi lain seperti ASEAN-COCI, dengan demikian sinergisitas diantara lembaga/komisi ASEAN sangatlah mendukung tercapainya tujuan penyelesaian masalah-masalah di ASEAN.

Keterlibatan dan kehadiran *ASEAN Committee on Culture and Information* (ASEAN-COCI) dan AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*) sangat dinantikan dalam menyelesaikan atau minimal mengurangi terjadi permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan,

---

<sup>9</sup>Koran Sindo, Dinamika HAM di Asia Tenggara, sumber :[http://koran-sindo.com/page/news/2016-02-10/0/3/Dinamika\\_HAM\\_di\\_Asia\\_Tenggara](http://koran-sindo.com/page/news/2016-02-10/0/3/Dinamika_HAM_di_Asia_Tenggara), diakses tanggal 20 Juli 2017.

<sup>10</sup>Lihat Terms of Reference of *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, diadopsi pada sidang tingkat Meteri (19-20 Juli 2009) yang dapat ditemukan di : <http://www.asean.org/DOC-TOR-AHRB.pdf>, diakses tanggal 20 Juli 2017.

<sup>11</sup>*Ibid* 9.

<sup>12</sup>*Ibid*.

konflik keagamaan dan HAM di ASEAN. Sudah sepatutnyalah ASEAN tidak hanya berwacana melainkan benar-benar menyentuh akar permasalahan yang ada melalui pendekatan *rasa* Asia dan sosial budaya Asia yang lebih santun dan bermartabat tentunya dengan pelibatan komponen masyarakat dan sumber daya yang tersedia, sehingga diharapkan ASEAN kedepannya melalui sub organisasinya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat semua lapisan.

### C. Kesimpulan dan Rekomendasi.

Permasalahan pekerja migran, HAM dan intoleransi keagamaan bukan saja menjadi masalah nasional suatu negara, tetapi sudah menjadi masalah regional yang penangannya pun memerlukan keterlibatan organisasi regional. ASEAN sebagai satu-satunya organisasi regional di kawasan Asia Tenggara dirasakan masih bertahan pada status quonya yang elitis dan menjaga jarak dengan permasalahan-permasalahan politik praktis dengan prinsip non-intervensinya.

Keadaan ini mungkin dianggap sebagai salah satu penyebab lambannya penyelesaian HAM, ketenagakerjaan dan intoleransi yang diterjadi di negara-negara ASEAN.

Pendekatan sosial budaya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di ASEAN belum menyentuh masyarakat level bawah, keadaan ini semakin sulit ketika masih banyak masyarakat di negara-negara anggota ASEAN yang malah tidak tahu menahu program-program ASEAN.

Belum tercapainya konsensus bersama mengenai strategi pemajuan HAM, kesepakatan mengenai proteksi dan promosi hak pekerja migran dan masih adanya dualisme dalam masalah intoleransi keagamaan, menjadikan posisi ASEAN semakin sulit untuk berkembang dalam mencapai tujuan-tujuan mulia ASEAN.

Rekomendai yang dapat penulis sampaikan dalam menyikapi permasalahan di atas, yaitu :

1. Pada permasalahan buruh migran, pendekatan sosial budaya dapat diwujudkan melalui pengembangan sikap terbuka atas pekerja migran di masyarakat negara penerima, juga ditumbuhkembangkan adanya saling ketergantungan yang menguntungkan antara pemberi kerja dan pencari kerja.

Pendekatan sosial-budaya dalam menganalisis perilaku mobilitas tenaga kerja tetap perlu dan penting, sepanjang dilihat kaitannya dengan konteks di mana mobilitas tenaga kerja itu terjadi pada kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, kekutan-kekuatan tradisional dari aspek-aspek sosial-budaya dilihat sebagai suatu hal yang dinamis, berubah dan berkembang<sup>13</sup>, sehingga pelibatan semua pemangku kepentingan di tingkat desa sampai pemerintah pusat sangatlah diperlukan terutama sekali guna membangun komunikasi yang intens antara pelaku pekerja migran dengan keluarganya,

---

<sup>13</sup>Toto Sucipto, Mobilitas Tenaga Kerja dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Budaya, sumber :<http://bpsnt-bandung.blogspot.co.id/2010/01/mobilitas-tenaga-kerja-dan-dampaknya.html#.WXevvekxXDc>, diakses tanggal 20 Juli 2017.

hal ini juga akan memudahkan apabila terjadi permasalahan di tempat penerima kerja.

ASEAN sangat diharapkan kehadiran dan perannya sebagai pihak yang mampu menjembatani komunikasi tersebut, sekaligus juga memberikan perlindungan bagi pekerja migran atas hak-haknya. Dari komunikasi yang berjalan baik antara ASEAN dengan pemerintah desa, tentunya ASEAN akan dijadikan rujukan informasi bagi segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerja migran dan peran ASEAN demikian akan semakin dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat dari negara-negara anggotanya.

2. Pada permasalahan HAM yang masih belum mencapai konsensus bersama, sehingga peranan AICHR masih berjalan di tempat, ada baiknya juga diupayakan melalui pendekatan sosial budaya dengan melibatkan lebih banyak tokoh masyarakat dan agama, sehingga diharapkan menginspirasi bagi para pengambil keputusan di tingkat ASEAN akan sumber-sumber atau model-model HAM yang diingkankan sesuai dengan rasa Asia yang bersumber dari kebiasaan, kebudayaan dan sistem kekerabatan yang kuat dan yang selama ini menjadi ciri khas ketimuran dari masing-masing negara anggota ASEAN yang bersifat universal.
3. Apabila ASEAN mampu mengidentifikasi sumber-sumber dan model-model universal hak asasi manusia dari kekerabatan dan kehidupan sosial budaya masyarakat Asia Tenggara, dengan sendirinya masalah intoleransi keagamaan yang nyaris menjadi semacam model konflik baru akan mampu diredam dan tidak menjadi ancaman yang lebih luas.